

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Okny Septiawan
Okny.septiawan@gmail.com
Lailatul Amanah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine empirically the influence of human resources quality, the use of information technology, and internal control to the reliability of local government financial reporting. The respondents in this research is all structural officials who are involved in the local government financial reporting. The structural officials who are involved in this research are Local Official Financial Management (PPKD) and Local Financial Management Working Unit (SKPKD). This research has selected the Local Apparatus Organization of Surabaya city as the population which consists of Local Secretariats, Local Inspectorate, Local Agencies. The sample collection technique has been done by using purposive sampling which means that the sample collection is based on particular consideration and criteria. The data analysis technique has been carried out by using multiple linear regressions analysis. It has been found from the result of the research that human resources quality, the use of information technology, and internal control are suitable as the explanatory variable and it gives positive influence to the financial reporting reliability.

Keywords: Human resources quality, the use of information technology, internal control

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Responden dalam penelitian ini adalah pejabat struktural yang terlibat dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Adapun pejabat struktural yang terlibat dalam penelitian ini adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Penelitian ini mengambil populasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, dan Dinas Daerah. Dalam pengambilan sampel teknik yang di gunakan adalah *Purposive Sampling* yang berarti bahwa pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern sesuai sebagai variabel penjelas dan berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Kata Kunci: Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern

PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal dan tidak tepat waktu. Keandalan dan *timeliness* informasi laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak.

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, sertadapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Proses pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sudah ditetapkan. Setelah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya laporan keuangan daerah harus diaudit dan dalam hal ini diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan diaudit untuk memeriksa salah satunya apakah laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan, juga apakah laporan keuangan sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ada seperti yang ditetapkan perundang-undangan yakni, laporan keuangan harus relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Demi terselenggaranya keterandalan pelaporan keuangan yang baik, maka harus ada sumber daya manusia yang berkualitas, pemanfaatan teknologi yang baik dalam penggunaan sistem pelaporan keuangan dan pengendalian internal. Kualitas informasi dalam pembuatan laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang bekerja dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan. Sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dibuat dan sangat di mungkinkan akan berpotensi dengan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompentensi juga dapat memberikan kontribusi yang tepat dalam hasil laporan keuangan yang berkualitas secara efektif dan efisien serta relevan. Hal tersebut tidak terlepas dari peranan kualitas sumber daya manusia yang berkompentensi tersebut yang telah mengetahui dan memahami prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan demikian apa yang akan dikerjakan akan mengupayakan norma - norma yang ada. Sehingga penyajian laporan keuangan bisa efektif dan efisien. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan.

Senada dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Primayana dan Anantawikrama (2014) serta Febriady (2007) memperoleh hasil bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa semakin memadai kualitas sumber daya manusia maka pemerintah daerah juga akan semakin baik dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang andal. Sedangkan penelitian yang dilakukan Karmila (2012) serta Indriasari dan Nahartyo (2008) memperoleh hasil bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Ketidaksignifikanan ini disebabkan kondisi kualitas sumber daya manusia di subbagian akuntansi/tata usaha keuangan yang belum mendukung.

Kapasitas sumber daya manusia yang memadai, namun jika tidak didukung dengan teknologi informasi belum tentu dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal. Sistem akuntansi pemerintah daerah memiliki transaksi yang kompleks dan volumenya relative besar. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi secara bijaksana akan sangat membantu dalam proses tahapan dalam pengolahan data transaksi dan aktivitas keuangan sehingga

dapat dimungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan terbebas dari kesalahan material yang disebabkan oleh *human eror*.

Komputer telah menggantikan teknologi manual dengan melakukan tahapan pemrosesan atas data yang jumlahnya relative besar, ataupun menjalankan pekerjaan yang sangat kompleks. Komputer juga dapat bekerja sangat konsisten serta *reliabel* (dapat dipercaya) dalam waktu yang lebih cepat bila dibanding dengan kemampuan manusia. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah serta dapat menyampaikan informasi keuangan daerah kepada pengguna. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan daerah.

Faktor yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern. Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk meyakinkan stakeholders maupun publik tentang keakuratan dan keandalan laporan keuangan yang dibuat pemerintah maka dibutuhkan sistem pengendalian intern yang optimal.

Pengendalian intern diharapkan mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi serta dapat memberikan perlindungan bagi data organisasi dari adanya ancaman penyelewengan atau sabotase sistem. Pengendalian intern disusun agar pelaporan keuangan dapat memenuhi asas ketertiban yang merupakan cerminan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

TINJAUAN TEORETIS

Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) diantara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*. Hubungan keagenan terjadi ketika satu atau lebih individu yang disebut *principal* menyewa individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai *agent*, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada *agent* tersebut (Brigham dan Houtson, 2006:26). Teori yang menjelaskan hubungan *principal* dan *agent* ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan sosiologi, dan teori organisasi.

Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Teori keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap oportunistik dan cenderung tidak menyukai resiko. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan *stakeholders* terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akurat dalam pengelolaan keuangan daerah (Safitri, 2009).

Good Corporate Governance Theory

Usaha untuk melembagakan *corporate governance* pertama kalinya dilakukan oleh *Bank of England* dan *London Stock Exchange* pada tahun 1992 dengan membentuk *Cadbury Committee* (Komite Cadbury). *Cadbury Committee* (Komite Cadbury) bertugas menyusun *corporate governance code* yang menjadi acuan utama di banyak negara. Komite Cadbury mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Agoes, 2013:101).

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Aksesibilitas dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada publik atas laporan keuangan yang dihasilkannya.

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability* dan *stewardship*) (Mardiasmo, 2002).

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi: Keterbukaan, Kemudahan, *Accesible*.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan individu dalam suatu organisasi (kelembagaan), atau sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan (*outputs*) dan (*outcomes*).

Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai laporan keuangan disebabkan oleh kondisi pegawai bagian keuangan yang mendukung dan diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah karena dengan meningkatkan sumber daya manusia berarti membentuk kompetensi-kompetensi dan komitmen pegawai baik secara individu atau kelompok guna memenuhi kebutuhan organisasi dan mengintegrasikan kompetensi.

Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keandalan. Selain itu, pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan

dalam pengolahan data juga akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatanwaktu.

Untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dan diversitas aplikasi yang dijalankan. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electroniccommerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000).

Teknologi informasi terdiri dari bagian utama yaitu teknologi komputer dan perlengkapan komputer yang berfungsi untuk menerima data, menyimpan data dan mengolah data menjadi informasi, serta mencetak atau membuat dan mengkomunikasikan informasi tersebut.

Hamzah (2009) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya: (1) Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik (2) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini. Pemanfaatan teknologi informasi, khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik, mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi/instansi pemerintah dalam kerangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pelaksanaan *e-government* (Hamzah, 2009).

Perubahan dalam pola penyusunan laporan keuangan daerah yang awalnya secara manual dilihat tidak efektif, efisien dan untuk nilai keandalan suatu laporan keuangan masih kurang keakuratannya karena penyusunan laporan keuangan secara manual lebih besar resiko terjadi kesalahan, oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan daerah sangatlah dibutuhkan, teknologi informasi yang salah satu contohnya komputer dapat membantu mempercepat pekerjaan yang sedang dikerjakan, dengan menggunakan komputer akan lebih akurat dan konsisten dalam melakukan perhitungan (Primayana dan Anantawikrama, 2014).

Pengendalian Intern

PP No. 60 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (1) Keterandalan pelaporan keuangan (2) Efisiensi dan efektivitas operasi (3) Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian intern akuntansi merupakan rencana organisasi dan metode yang bertujuan untuk mengamankan aset yang ada pada organisasi tersebut, serta menguji sejauh mana data akuntansi dapat dipercaya. Pengendalian intern digunakan untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana suatu dikerjakan dan mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang sudah ditetapkan. Pengendalian Intern tidak digunakan untuk menghilangkan peluang terjadinya kesalahan dan kecurangan, tetapi dengan adanya

pengendalian intern yang baik akan menekan resiko terjadinya hal tersebut sehingga dapat segera diketahui dan diatasi secara cepat agar tidak menimbulkan kerugian. Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi (*internal accounting control*) dan pengendalian intern administratif (*internal administrative control*). Pengendalian intern akuntansi atau pengendalian akuntansi yang merupakan bagian dari pengendalian intern yang berkaitan dengan tujuan menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi. Sedangkan pengendalian intern administratif berkaitan dengan tujuan mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dijalankan. Kebijakan dan prosedur tersebut membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan pada berbagai jenjang organisasi dan fungsi. (Wilkinson *et al.*, 2000). Menyebutkan subkomponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan sebagai berikut: (1) Perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatan-catatan bernomor (2) Pemisahan tugas (3) Otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi (4) Pemeriksaan independen atas kinerja (5) Penilaian yang sesuai/tepat atas jumlah yang dicatat.

Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah struktur dan proses meliputi segala aspek yang berkaitan dengan bagaimana penyediaan, pelaporan dan penyampaian informasi keuangan suatu pemerintahan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan yang akan membantu pencapaian tujuan ekonomik dan sosial (Suwardjono, 2012:110). Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat, peraturan yang berlaku dan mekanisme penyampaian informasi. Sedangkan laporan keuangan merupakan medium dalam penyampaian informasi. PP No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menyebutkan bahwa keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan yang meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai dari manusia untuk menyelesaikan tugas ataupun tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keterandalan. Indriasari dan Nahartyo (2008) membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan akuntansi keuangan pemerintah daerah di kota Palembang dan kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan. Bukti penelitian ini di dukung oleh hasil penelitian Risa (2008) serta Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai pelaporan keuangan pemerintah daerah. Maka hipotesis di rumuskan sebagai berikut :

H₁: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan komputer, software/perangkat lunak, dan lainnya yang sejenis secara optimal (Wilkinson et al., 2000 dalam Arfianti, 2011). Dalam hal ini komputer merupakan bagian terpenting dari teknologi informasi akan sangat membantu peningkatan kualitas dari informasi. Teknologi informasi yang salah satu contohnya komputer dapat membantu mempercepat pekerjaan yang sedang dikerjakan, dengan menggunakan komputer akan lebih akurat dan konsisten dalam perhitungan dari pada menggunakan sistem manual. Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, multi-processing (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi.

H₂: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah

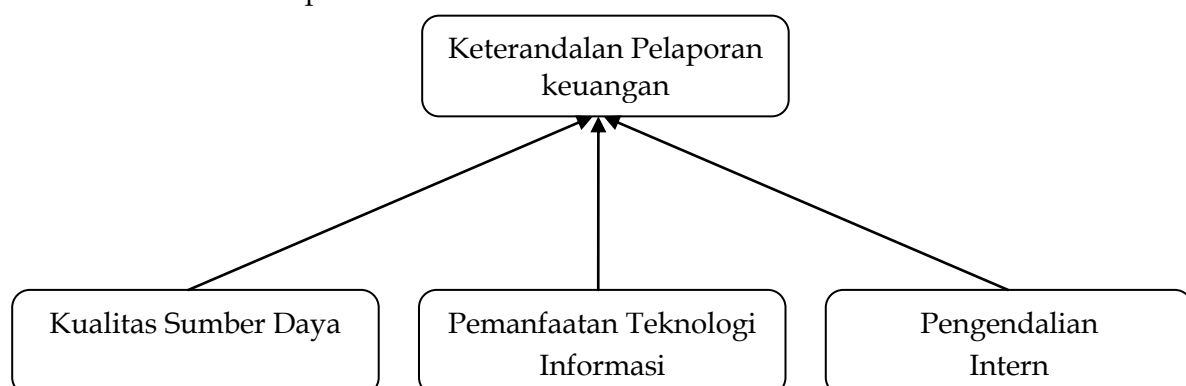
Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Menurut Mulyadi (2010) pengendalian intern akuntansi dirancang dari dua tujuan sistem yaitu menjaga kekayaan perusahaan dan mengecek ketelitian serta keterandalan informasi akuntansi. Pengendalian intern akuntansi meliputi rencana organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan-catatan yang bertujuan untuk mengamankan aktiva dan juga agar dapat dipercayainya catatan keuangan. Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk memberikan keyakinan akan transaksi-transaksi apakah dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya. Mencatat transaksi dapat memudahkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi atau kriteria yang ditentukan yang sesuai dengan tujuan laporan tersebut. Indriasari dan Nahartyo (2008) serta Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian intern akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka diduga ada pengaruh antara pengendalian intern dan keterandalan pelaporan keuangan daerah. Dugaan ini akan diuji dalam hipotesis sebagai berikut:

H₃: Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Model Penelitian

Model Penelitian dalam penelitian ini adalah :



Gambar 1
Model penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif (*causal-comparative research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat serta pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern sebagai variabel independen terhadap keterandalan pelaporan keuangan sebagai variabel dependen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena menitikberatkan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi dari penelitian ini adalah OPD Kota Surabaya dengan jumlah populasi sebanyak 37 OPD.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel, teknik yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Penelitian ini mengambil populasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Surabaya, jumlah OPD Kota Surabaya adalah 68 OPD yang terdiri dari 10 Sekretariat Daerah, 1 Inspektorat Daerah, 22 Dinas Daerah, 4 Badan Daerah dan 31 kecamatan daerah Kota Surabaya yang tidak di jadikan bagian sampel populasi penelitian ini, dikarenakan data yang diinginkan peneliti tidak tersedia dalam populasi sampel tersebut. Dan kriteria atau pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud adalah pejabat struktural yang terlibat dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Adapun pejabat pejabat struktural yang terlibat dalam penelitian ini adalah Pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) dan Satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) bekerja di lingkungan Pemda Kota Surabaya lebih dari lima tahun.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran penelitian yang berisikan daftar pertanyaan terstruktur berupa kuesioner yang ditujukan kepada responden. Dalam bentuk *skala Likert* 5 poin dengan skor terendah 1 (sangat tidak setuju) dan tertinggi 5 (sangat setuju).

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara metode survei yang dimana metode pengumpulan data yang menggunakan kuesioner. Metode survei merupakan cara pengumpulan data di mana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis (Sanusi, 2014:105). Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014:199).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Definisi Operasional Variabel

Kualitas sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan yang meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai dari manusia untuk menyelesaikan tugas ataupun tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Dalam pembuatan kuesioner indikator yang di jadikan alat ukur diadopsi dari penelitian yang di lakukan Yosefrenaldi (2008).

Terdapat 4 indikator yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yaitu: (a) Latar belakang pendidikan pada sub bagian keuangan/akuntansi (b) Peran dan tanggung jawab sub bagian keuangan (c) Pelatihan keahlian dalam tugas (d) Sumber daya manusia yang berpengalaman.

Pemanfaatan teknologi informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dan diversitas aplikasi yang dijalankan. Untuk mengukur variabel ini menggunakan *skala likert* dan menunjukkan sejauh mana teknologi informasi dalam menyusun laporan keuangan. Dalam pembuatan kuesioner indikator yang di jadikan alat ukur diadopsi dari penelitian yang di lakukan Yosefrenaldi (2008). Terdapat 5 indikator yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi yaitu: (a) Penggunaan secara optimal dari komputer dan perangkat lunak (b) Aplikasi *software* yang digunakan (c) Proses akuntansi secara komputerisasi (d) Laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi (e) Perawatan perangkat yang digunakan.

Pengendalian intern

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk mengukur variabel ini menggunakan *skala likert* dan menunjukkan tingkat pengendalian dalam proses menyusun laporan keuangan. Terdapat 5 indikator menurut (Ariesta, 2013) yang menjadi acuan dalam pembuatan kuesioner, yaitu: (a) *Standard Operating Procedure* (SOP) (b) Pemisahan wewenang (c) Dokumen dan catatan yang memadai (d) Pembatasan akses (e) Langkah-langkah pencegahan kecurangan.

Keterandalan pelaporan keuangan

PP No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menyebutkan bahwa keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dengan *skala likert* dan menunjukkan tingkat keandalan laporan keuangan pemerintah. Terdapat 5 indikator yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan yaitu: (a) Adanya transaksi keuangan yang jujur dan wajar (b) Adanya laporan keuangan pokok sesuai aturan (c) Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji (d) Adanya rekonsiliasi yang dilakukan secara periodik (e) Informasi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan umum.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis yang dimana perhitungannya menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) yang bertujuan untuk menentukan pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah Kota Surabaya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu variabel.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji Validasi sering digunakan untuk mengukur ketetapan suatu item adalah kuisisioner, apakah item pada kuisisioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur (Ghozali, 2011:45). Dalam rangka mengetahui uji validitas, dapat digunakan koefisien kolerasi yang nilai signifikannya lebih kecil dari 5% (*level of significance*) menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut sudah sah valid sebagai pembentuk indikator. Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari empat variabel yang digunakan dalam penelitian

inidengan sampel 36 responden. Berikut ini merupakan uji validitas dengan program SPSS maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	Sig.	Keterangan
Kualitas sumber daya manusia (X1)	X _{1.1}	0,812	0,000	Valid
	X _{1.2}	0,813	0,000	Valid
	X _{1.3}	0,826	0,000	Valid
	X _{1.4}	0,734	0,000	Valid
	X _{1.5}	0,806	0,000	Valid
	X _{1.6}	0,830	0,000	Valid
	X _{1.7}	0,774	0,000	Valid
	X _{1.8}	0,691	0,000	Valid
	X _{1.9}	0,803	0,000	Valid
Pemanfaatan teknologi informasi (X2)	X _{2.1}	0,546	0,000	Valid
	X _{2.2}	0,732	0,000	Valid
	X _{2.3}	0,617	0,000	Valid
	X _{2.4}	0,755	0,000	Valid
	X _{2.5}	0,717	0,000	Valid
	X _{2.6}	0,606	0,000	Valid
	X _{2.7}	0,755	0,000	Valid
	X _{2.8}	0,755	0,000	Valid
Pengendalian intern (X3)	X _{3.1}	0,708	0,000	Valid
	X _{3.2}	0,779	0,000	Valid
	X _{3.3}	0,657	0,000	Valid
	X _{3.4}	0,826	0,000	Valid
	X _{3.5}	0,694	0,000	Valid
	X _{3.6}	0,817	0,000	Valid
	X _{3.7}	0,813	0,000	Valid
	X _{3.8}	0,626	0,000	Valid
	X _{3.9}	0,649	0,000	Valid
Keterandalan pelaporan keuangan (Y)	Y ₁	0,706	0,000	Valid
	Y ₂	0,762	0,000	Valid
	Y ₃	0,656	0,000	Valid
	Y ₄	0,747	0,000	Valid
	Y ₅	0,550	0,000	Valid
	Y ₆	0,815	0,000	Valid
	Y ₇	0,648	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa semua butir pernyataan yang mengukur variabel independen yaitu kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern serta variabel dependen yaitu keterandalan pelaporan keuangan, keseluruhan item pernyataan dinyatakan valid. Hal ini terjadi karena keseluruhan item pernyataan menghasilkan nilai signifikansi $< 0,05$.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* berada diatas 0,6. Berdasarkan uji reliabilitas yang dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kualitas sumber daya manusia (X1)	0,917	Reliabel
Pemanfaatan teknologi informasi (X2)	0,838	Reliabel
Pengendalian intern (X3)	0,886	Reliabel
Keterandalan pelaporan keuangan (Y)	0,822	Reliabel

Sumber: Data primer diolah.

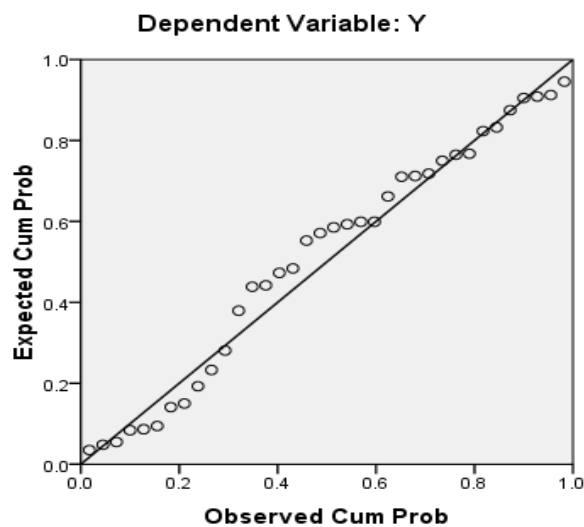
Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Data berdistribusi normal, jika penyebaran plot berada disepanjang garis 45⁰ sebagai berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data primer diolah

Gambar 1

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual	Keterangan
Kolmogorov-Smirnov Z	0,663	
Asymp. Signifikansi	0,772	Normal

Sumber: Data primer diolah

Hasil grafik plot normal dapat diketahui berada di sepanjang garis 45⁰, sedangkan berdasarkan tabel 3 hasil uji normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yaitu nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* pada *Asymp. Signifikansi* lebih besar dari 5% (0,05) yaitu sebesar 0,772 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal, sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mendeteksi adanya problem multikolinieritas, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

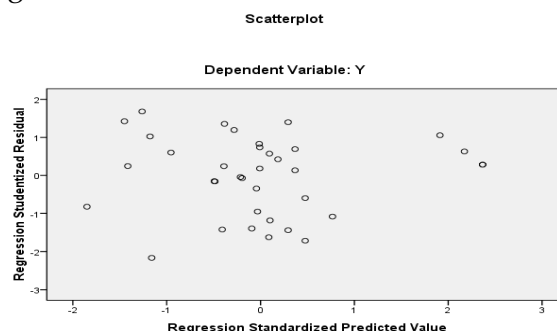
Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>		Keterangan
	Tolerance	VIF	
kualitas sumber daya manusia	0,512	1,952	Non Multikolinieritas
Pemanfaatan teknologi informasi	0,742	1,348	Non Multikolinieritas
Pengendalian intern	0,559	1,788	Non Multikolinieritas

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 4 diatas terlihat bahwa nilai *tolerance* mendekati angka 1 dan nilai *variance inflation factor (VIF)* lebih rendah dari 10 untuk setiap variabel, maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau bebas multikolinieritas, sehingga seluruh variabel independen (X) tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika *variance* berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil heteroskedastisitas dapat digambarkan sebagai berikut



Sumber: Data primer diolah

Gambar 3
Gambar Scatterplot

Berdasarkan gambar 3 grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi keterandalan pelaporan keuangan berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhinya yaitu kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern. Setelah dilakukan uji asumsi klasik tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi linier dalam penelitian ini, bebas dari asumsi dasar (klasik) tersebut, sehingga pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t yang akan dilakukan dalam penelitian ini tidak akan bias atau sesuai dengan tujuan penelitian.

Analisis Regresi Linier Berganda

Perhitungan regresi linier berganda antara kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan dengan dibantu program *SPSS* dalam proses perhitungannya dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5
Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients B	T	Sig
Konstanta	-0,172	-	-
Kualitas sumber daya manusia	0,360	2,886	0,007
Pemanfaatan teknologi informasi	0,301	2,420	0,021
Pengendalian Intern	0,3660	3,188	0,003

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan tabel diatas maka prediksi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KP = -0,172 + 0,360KM + 0,301TI + 0,360PI + e$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut diatas memberikan pengertian bahwa: (1) β_1 (nilai koefisien regresi kualitas sumber daya manusia) bernilai positif, mempunyai arti apabila kualitas sumber daya manusia semakin meningkat, maka keterandalan pelaporan keuangan yang dihasilkan semakin meningkat (2) β_2 (nilai koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi) bernilai positif, mempunyai arti apabila pemanfaatan teknologi informasi semakin meningkat, maka keterandalan pelaporan keuangan yang dihasilkan semakin meningkat (3) β_3 (nilai koefisien regresi pengendalian intern) bernilai positif, mempunyai arti apabila pengendalian intern semakin meningkat, maka keterandalan pelaporan keuangan yang dihasilkan semakin meningkat.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 6
Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.854 ^a	.729	.703	.26356

a. Predictors: (Constant), PI, TI, KM

b. Dependent Variable: KP

Sumber: Data primer diolah

Hasil uji koefisien determinasi dan koefisien korelasi berganda menunjukkan nilai R sebesar 0,854. Hal ini berarti bahwa hubungan atau korelasi antara faktor-faktor yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan adalah kuat karena $> 0,50$. Nilai R Square sebesar 0,729 atau 72,9%, ini menunjukkan bahwa variabel keterandalan pelaporan keuangan yang dapat dijelaskan variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern adalah sebesar 72,9%, sedangkan sisanya 27,1% dijelaskan faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

Uji Goodness Of Fit (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini:

Tabel 7
Hasil Uji F

F hitung	Signifkansi	Keterangan
28,667	0,000	fit

Sumber: Data primer diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} dengan tingkat signifikansi 0,000 (di bawah 0,05) sebesar 28,667. Berdasarkan tingkat signifikansinya, maka disimpulkan H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti variabel independen yang terdiri dari kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern sesuai sebagai variabel penjelas keterandalan pelaporan keuangan.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui variabel bebas secara parsial atau individu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011). Kriteria pengujian dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$. Apabila signifikansi uji $t < 0,05$ maka H_0 ditolak, sedangkan apabila nilai signifikansi uji $t > 0,05$ maka H_0 diterima. Berikut ini hasil uji t menggunakan SPSS sebagai berikut

Tabel 8
Hasil Uji t

Model	T	Koefisien	Beta	Sig
Kualitas sumber daya manusia	2,886	0,360	0,371	0,007
Pemanfaatan teknologi informasi	2,420	0,301	0,259	0,021
Pengendalian Intern	3,188	0,360	0,392	0,003

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan pada tabel diatas maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 8, diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk kualitas sumber daya manusia adalah $\alpha = 0,007 < 0,05$ menandakan bahwa kualitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Sehingga H_1 yang menyatakan dugaan adanya pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan diterima.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Hasil perhitungan tabel 8, diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk pemanfaatan teknologi informasi adalah $\alpha = 0,021 < 0,05$ menandakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Sehingga H_2 yang menyatakan dugaan adanya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan diterima.

Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Hasil perhitungan tabel 8, diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk pengendalian intern adalah $\alpha = 0,003 < 0,05$ menandakan bahwa pengendalian intern mempunyai pengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Sehingga H_3 yang menyatakan dugaan adanya pengaruh pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan melalui beberapa uji yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Berdasarkan uji F pada uji regresi linier berganda yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern sesuai sebagai variabel penjelas keterandalan pelaporan keuangan (2) Berdasarkan hasil uji t pada uji regresi linier berganda dapat diketahui: (a) Bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan (b) Bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan (c) Bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan peneliti antara lain: (1) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian di luar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, misalnya faktor kepuasan kerja yang bisa digunakan untuk meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan, mengingat terdapat pengaruh sebesar 27,1% dari variabel lain yang tidak diikuti sertakan dalam penelitian ini (2) Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan wawancara untuk meningkatkan pemahaman terhadap jawaban responden (3) Penelitian ini masih terbatas pada variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah, bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang masih mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah misalnya sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes. 2013. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja SDM Pada PTPN III Persero Tanjung Morawa. *Jurnal*. Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Afrianti. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Batang. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Batang.
- Ariesta. 2013. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Brigham, E. F. dan J. F. Houtson. 2006. *Fundamental og Financial Management: Dsar – dasar Manajemen Keuangan*. Edisi Kesepuluh. Salemba Empat. Jakarta.
- Febriady. 2007. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang
- Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hamzah. 2009. Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial, Kesesuaian Tugas dan Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai Terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten di Pulau Madura). *Simposium Nasional Sistem Teknnologi Informasi*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Indriasari dan Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. *Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak.
- Karmila. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Riau. *Jurnal*. 9:1.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi pertama. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Edisi ke-3. Cetakan ke-5. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Primayana dan Anantawikrama. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi Pemanfaatan Teknologi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Journal* 2(1).
- Risa. 2008. Pengaruh Insentif Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Pada Pt. Seftya Utama Balikpapan. *Jurnal*. 3 (3):638-649.
- Safitri. 2009. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Semarang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sanusi. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiono. 2014. *Metode penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Suwardjono. 2012. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta
- Warisno. 2008. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Winidyaningrum dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.
- Wilkinson, J. W., M. J. Cerullo. dan V. Bernard. 2000. *Accounting Information System Essential Concept and Application*. 4 Edition. John Willey & Sons Inc. New York.

Yosefrinaldi. 2008. Pengaruh Kapasitas Intelektual Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.